

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Ojol Ancam Bakal Demo Besar-besaran

JAKARTA (Poskota) - Pengemudi ojek online (ojol) mengancam akan melakukan demo besar-besaran jilid 3 jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) atau electronic road pricing (ERP) jalan berbayar elektronik.

Bahkan, saat dikonfirmasi awak media pengemudi ojol yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Penggunaan Dinas Transportasi (PREDATOR) ini akan meng-

gandeng buruh dan gerakan rakyat untuk menolak kebijakan ERP.

"Perihal pernyataan Pemprov yang batal tarik Raperda terkait ERP dari DPRD akan kita awasi dan siap turun kejalan PREDATOR Jilid 3 dengan mengajak elemen gerakan rakyat diluar ojol seperti buruh dan lain lain," ujar Humas PREDATOR, Afvid, Selasa (14/2).

Afvid juga mengatakan, bahwa tidak ada lagi kompromi dan

mediasi karena secara tegas pihaknya menolak kebijakan ERP yang dianggap sangat merugikan para pengemudi ojol. "Tetap teguh pada pendirian bahwa Kami menolak dengan tegas dan lugas ERP Tanpa kompromi dan Mediasi," tegasnya.

Afvid menambahkan, bahwa pihaknya mempunyai bukti kuat terkait pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Syafrin Liputo saat menemui massa aksi di Balai Kota Jakarta, pada Rabu 8 Febru-

ari 2023 lalu.

Saat menemui massa aksi, diatas mobil komando (mokom), Syafrin berjanji akan menarik Raperda ERP dari DPRD DKI Jakarta. "Karena kita punya bukti yg kuat terkait pernyataan Kadishub Bapak Syafrin diatas mobil komando disaksikan Ribuan Driver online yang merekam pernyataan beliau akan menarik Raperda ERP dari DPRD," ucap Afvid. "Kami berharap agar Pemprov DKI Jakarta Konsisten

dengan ucapan yang disampaikan kadishub untuk menarik Raperda ERP," pungkasnya menambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo mengatakan, sampai detik ini belum ada niatan Pemprov DKI untuk mencabut wacana penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau electronic road pricing (ERP) jalan berbayar elektronik. **(Aldi/yh)**